

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan telah membuat jutaan rakyat di negeri ini sulit mendapatkan kelayakan untuk hidup, kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, bahkan kemiskinan menyebabkan tingkat kriminalitas semakin tinggi. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari semua aparatur pemerintahan, kemiskinan terjadi karna kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di lapangan, jika dipandang dari sudut pandang pendidikan, kemiskinan terjadi karna kurangnya pendidikan yang di dapatkan masyarakat menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Kemiskinan adalah alasan yang sempurna dengan rendahnya Human Development Index (HDI) Pembangunan Manusia Indonesia. Berikut ini data Human Development Index (HDI) Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2012 :

Tabel 1.1
Data Human Development Index (HDI) Indonesia Tahun 2011

Human Development Index (HDI) Indonesia	Life expectancy at birth	Mean years of schooling	Expected years of schooling	Gross national income (GNI) per capita	GNI per capita rank minus HDI rank	Nonincome HDI
Value	(years)	(years)	(years)	(2005 PPP \$)		Value
2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
0.617	69.4	5.8	13.2	3,716	-2	0.674

Sumber : <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN.html> Akses 5 Februari 2014.

Pada tanggal 2 November Tahun 2011 UNDP mengeluarkan daftar HDI, Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 Negara dengan angka *Life Expectancy At Birth* 69.4 pertahun, *Mean Years Of Schooling* 5.8, dan *Income Percapita* US\$ 3.716. *Trend* HDI di wilayah Asia-Pasifik lebih baik lagi pada tahun yang sama dengan angka 0.671, sedangkan HDI Indonesia dengan angka 0.617. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa HDI Indonesia masih dibawah rata-rata HDI Asia Pasifik.

Tabel 1.2
Data Human Development Index (HDI) Indonesia Tahun 2012

Human Development Index (HDI) Indonesia	Life expectancy at birth	Mean years of schooling	Expected years of schooling	Gross national income (GNI) per capita	GNI per capita rank minus HDI rank	Nonincome HDI
Value	(years)	(years)	(years)	(2005 PPP \$)		Value
2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
0.629	69.8	5.8	12.9	4.154	-3	0.672

Sumber : <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN.html> Akses 5 Februari 2014.

Pada Tahun 2011, Indonesia berada pada posisi 121 dari 187 Negara dengan angka *Life Expectancy At Birth* 69.8 pertahun, *Mean Years Of Schooling* dengan angka 5.8, dan Income Percapita US\$ 4.154. *Trend* HDI di wilayah Asia-Pasifik lebih baik lagi pada tahun 2012 dengan angka 0.683, sedangkan HDI Indonesia 0.629. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa HDI Indonesia masih dibawah rata-rata HDI Asia Pasifik.

Indeks Pembangunan manusia (IPM) untuk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut komponen dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011

Kabupaten/ Kota	Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata- rata Lama Sekolah	Pengeluar an Rill per kapita yang disesuaik an	IPM HDI	Pering kat IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kulonprogo	74,38	90,69	8,20	630,38	74,49	3
2. Bantul	71,31	91,03	8,82	646,08	74,53	4
3. Gunungkidul	70,97	84,66	7,65	625,20	70,45	5
4. Sleman	75,06	92,61	10,30	647,84	78,20	2
5. Yogya	73,44	98,03	11,48	649,71	79,52	1
DIY	73,27	92,02	9,21	646,56	75,77	4

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

Pada tahun 2011, angka harapan hidup Daerah istimewa yogyakarta adalah 73.27, Kabupaten Bantul berada pada peringkat kedua dengan angka harapan hidup 71.31, angka melek huruf 91.03, rata-rata lama sekolah 8.82, pengeluaran perkapita 646.08, IPM HDI 74.53 dan peringkat IPM 4.

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012

2012						
Kabupaten/ Kota	Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Rill per kapita yang disesuaikan	IPM HDI	Peringkat IPM
1. Kulonprogo	74,58	92,04	8,37	634,34	75,33	4
2. Bantul	71,34	92,19	8,95	654,96	75,58	3
3. Gunungkidul	71,04	84,97	7,70	631,91	71,11	5
4. Sleman	75,29	94,53	10,52	653,11	79,31	2
5. Yogya	73,51	98,10	11,56	657,65	80,24	1
DIY	73,27	92,02	9,21	653,73	76,75	4

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Pada tahun 2012, Kabupaten Bantul berada pada peringkat kedua dengan angka harapan hidup 71.34, angka melek huruf 92.19, rata-rata lama sekolah 8.95, pengeluaran perkapita 654.96, IPM HDI 75.58 dan peringkat 3 untuk IPM . jika dilihat dari tahun 2011-2012, ada kenaikan dari Kabupaten Bantul dari angka harapan hidup sampai dengan peringkat IPM.

Kabupaten Bantul adalah sebuah potret kabupaten/kota yang bisa dikatakan baik dalam penanggulangan atau penanganan kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Meski dilihat dari angka kemiskinan di Bantul lebih rendah sedikit dari angka kemiskinan DIY, namun pengentasannya tetap menjadi prioritas

ketiga Kecamatan tersebut memiliki berbagai variasi pada keterbatasan dibidang pendidikan KK miskin, kemampuan berobat KK miskin, dan jumlah KK miskin yang menganggur yang tinggi pada masing-masing kecamatan.

Untuk lebih meminimalisir permasalahan kemiskinan yang terus bertambah dari tahun ke tahun maka pemerintah Indonesia melalui kementerian sosial mengeluarkan program keluarga harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin Indonesia.

Di Indonesia program keluarga harapan ini pertama kali di implementasikan pada tahun 2007, sedangkan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul baru bisa berjalan di tahun 2008, program ini mencakup 5 Kecamatan yaitu Sewon, Kasihan, Sanden, Imogiri, dan Dlingo. Kemudian pada tahun 2009 ditambah 2 kecamatan pengembangan, yaitu Banguntapan, dan Pandak. Dalam pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan ini dilaksanakan oleh 4 orang operator yang bertugas di sekretariat UPPKH Kabupaten dan 9 pendamping yang bertugas di UPPKH Kecamatan.²

Program ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik walaupun masih ditemukannya permasalahan-permasalahan yang ada dalam implementasinya. BPK RI masih menemukan permasalahan dalam pelaksanaan PKH Tahun 2012, antara lain komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung

² <http://sosial.bantulkab.go.id/berita/baca/2013/08/20/083815/program-keluarga-harapan-pkh>
Akses 29 November 2013.

PKH masih kurang, proses validasi tidak sesuai ketentuan sehingga hasil validasi tidak akurat, proses verifikasi atas komitmen peserta PKH terhadap kesehatan dan pendidikan belum optimal, tidak ada keseragaman kebijakan yang ditetapkan oleh Kemensos sehingga pembayaran bantuan menjadi kurang efektif dan monitoring rutin/berkala dan evaluasi belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum.³

PKH dialokasikan ke daerah-daerah yang telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Di Kabupaten Bantul jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2013 sebanyak 3158 RTSM yang tersebar di 17 kecamatan.

Tabel 1.5
Jumlah RTSM PerKecamatan Data Bayar Tahap 1

No	Kecamatan	Jumlah RTSM
1	Bambanglipuro	261
2	Banguntapan	339
3	Bantul	230
5	Dlioni	96
6	Imogiri	157
7	Jetis	143
8	Kasihan	169
9	Kretek	47
10	Pajangan	153
11	Pandak	422
12	Piyungan	144
13	Pleret	135
14	Pundong	233
15	Sanden	142
16	Sedayu	136
17	Sewon	139
18	Srandakan	214

Sumber : Laporan Kegiatan PKH Tahun 2013 Kabupaten Bantul.

³ <http://www.bpk.go.id/news/efektivitas-program-keluarga-harapan>

Kecamatan Pandak memiliki jumlah RTSM terbanyak dengan jumlah 422 KK, yang pertama adalah desa dengan RTSM terbanyak yaitu Desa Gilangharjo sebanyak 161 RTSM, ditempat kedua di isi oleh Desa Caturharjo sebanyak 108 RTSM, di tempat ketiga Desa Triharjo sebanyak 100 RTSM, dan yang terakhir adalah Desa wijirejo sebanyak 53 KK.⁴

Terkait dengan implementasi program keluarga harapan yang sedang berjalan di Kecamatan Pandak dengan jumlah peserta yang paling tinggi dibandingkan Kecamatan lainnya maka perlu adanya koordinasi terkait pelaksanaannya, mulai dari pendataan sampai dengan pada proses pembayaran bantuan. Bantuan PKH ini diharapkan mampu memberi pelayanan yang baik kepada peserta program mulai dari pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat rumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2013?

⁴ <http://bantulkab.bps.go.id/images/KDA/2013/060/Kec.Pandak.Dalam.Angka.html> Akses 17 Desember 2013.

2. Faktor-faktor Apa Yang Mempengaruhi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk Mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- 2) Untuk Mengetahui Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca.
- 2) Untuk dapat dijadikan sumber kajian ilmu pengetahuan yang ada dalam penelitian.
- 3) Penelitian ini diharapkan memberi input yang berguna untuk Kecamatan Pandak, serta bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

D. Kerangka Dasar Teori

Sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroiti atau memecahkan masalah, maka perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Seperti yang dikatakan oleh Hoy & Miskel, teori adalah

seperangkat konsep, asumsi dan generasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi.⁵

Begitu pula yang dikatakan oleh Sugiono bahwa landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan yang sifatnya coba-coba (*trial and error*).⁶ Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan diri sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya. Sehubungan dengan itu, maka akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yang meliputi konsep kebijakan.

1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goal) program, keputusan undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan istilah-istilah tersebut tidak akan membuat masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama.

Thomas R. Dye dalam buku Riant Nugroho D mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah,

⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004, Hal. 55.

⁶ *Ibid*

mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.⁷

Sementara Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu.⁸

Sedangkan menurut Carl Frederick, kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.⁹

Islami memberikan pendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu dari kepentingan seluruh masyarakat. Implikasi pengertian tersebut adalah :

- a. Kebijakan publik bentuk perdanannya adalah penetapan tindakan-tindakan pemerintah,
- b. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan tapi juga dilaksanakan dalam bentuk nyata,

⁷ Nugroho D. Riant, *Public Policy Edisi Keempat Cetakan Pertama*, Jakarta: Elex Media Kompetindo Gramedia, 2012, Hal. 120.

⁸ H.A.R Tilaar dan Riant Nuhroho, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2008, Hal. 183.

⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisi Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua Cetakan Pertama*. Jakarta: Bumi aksara, 1997, Hal. 3.

- c. Setiap kebijakan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu,
- d. Kebijakan publik pada hakekatnya untuk kepentingan masyarakat.¹⁰

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif. dimana sebuah tuntutan dapat diakomodasi, namun pada akhirnya ruang bagi *win-win solution* sangat terbatas, sehingga kebijakan publik lebih banyak pada ranah *zero-sum-game*, yaitu menerima yang ini, dan menolak yang lain.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahapan yang menghubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses penerjemahan pernyataan kebijakan (*policy statement*) kedalam aksi kebijakan (*policy action*). Sedangkan Ripley mengartikan implementasi sebagai proses yang terjadi setelah

¹⁰ M.Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, Hal. 20.

sebuah produk hukum dikeluarkan yang memberikan otoritas terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu.¹¹

Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan (dan non-tindakan) oleh berbagai aktor, terutama birokrasi, yang sengaja di desain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu tujuan.

Goggin menggunakan pendekatan komunikasi dalam mengartikan implementasi yang diartikannya sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan Negara yang diarahkan untuk menjalankan suatu mandat yang telah ditetapkan.¹² Implementasi sering disejajarkan dengan ketaatan (*compliance*) Negara, atau suatu pemenuhan tuntutan prosedur hukum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan upaya menerjemahkan kebijakan publik yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian implementasi berhubungan dengan

¹¹ Randall B. Ripley, *Political Analysis in Political Sciences*, Chicago: Nelson Hill Inc, 1985, Hal. 30.

¹² Goggin, Malcomm L., *Implementation Theory and Practce : Towards a Third Generation*, Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education, Glenview: Illinois, 1991, Hal. 36.

penciptaan “*policy delivery system*” yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan output atau outcomes tertentu.¹³

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*), tahapan implementasi ini juga sebagai salah satu tahapan yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan dari kebijakan yang sudah ditetapkan tidak akan bisa terwujud. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan.

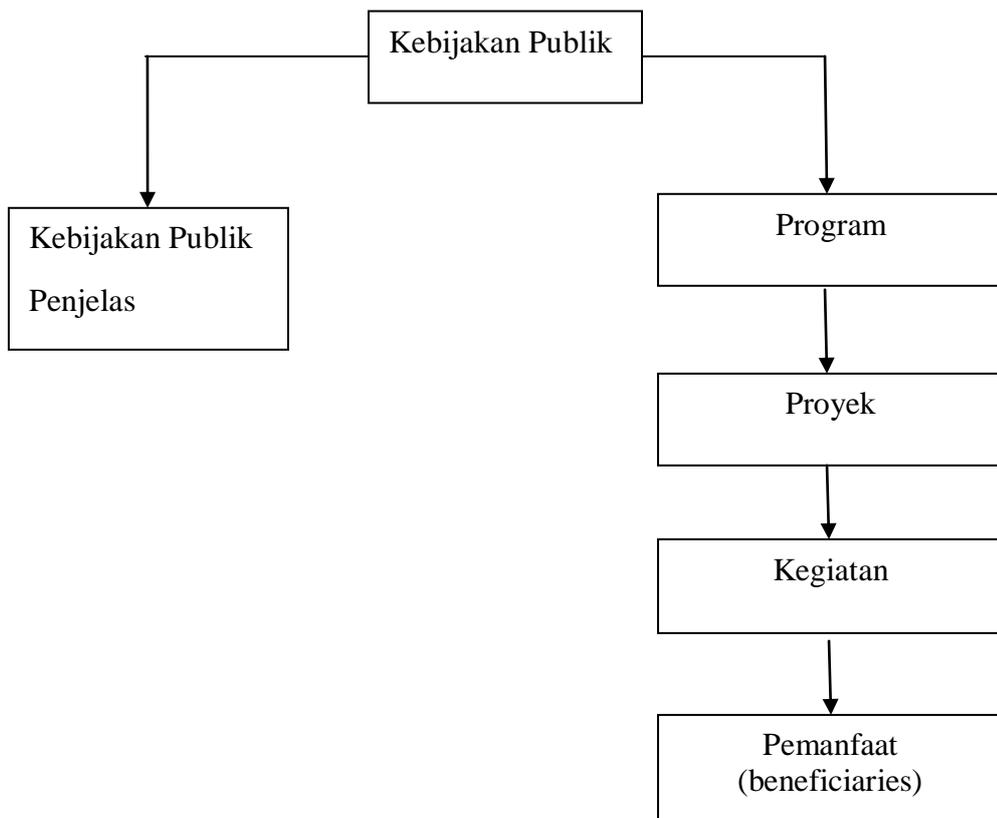
Jika menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka pada setiap tahapan kebijakan, baik pada tahapan perumusan atau pembuatan kebijakan, dan juga tahap implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

Menurut Riant Nugroho D, Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan maka ada dua langkah pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program

¹³ Merille S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, New Jersey : Pricenton University Press, 1980, Hal. 6.

atau melalui formulasi kebijakan, derivate atau turunan dari kebijakan tersebut.¹⁴ Secara umum digambarkan seperti pada skema berikut ini:

Gambar 1.2
Skema Implementasi Kebijakan



Sumber : Nugroho D. Riant. 2012. *Public Policy Edisi Keempat Cetakan Pertama*. Hal. 675.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah

¹⁴ Nugroho D. Riant. *Op.Cit.* Hal 674.

mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Udoji mengatakan bahwa pelaksanaan program dari suatu kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak di implementasikan.¹⁵

Sebagai salah satu kebijakan untuk mengatasi suatu masalah di masyarakat, perlu adanya kegiatan yang dituangkan dalam proyek-proyek. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya pelaksanaan implementasi program-program. Implementasi program merupakan sub bagian dari implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan merupakan fungsi dari implementasi program yang tergantung pada hasil atau *outcomes*.

Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan menyatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan.¹⁶ Ada beberapa model implementasi kebijakan, salah satunya adalah model yang

¹⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Negara Suatu Pengantar*, Rineka Cipta: Jakarta, 1991, Hal. 45.

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua Cetakan Pertama*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, Hal. 56.

paling klasik yaitu model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang lebih berpola puncak ke bawah (top-bottom) dan bermekanisme paksa dari pada mekanisme pasar.¹⁷

Model ini mengandaikan implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik, antara lain :

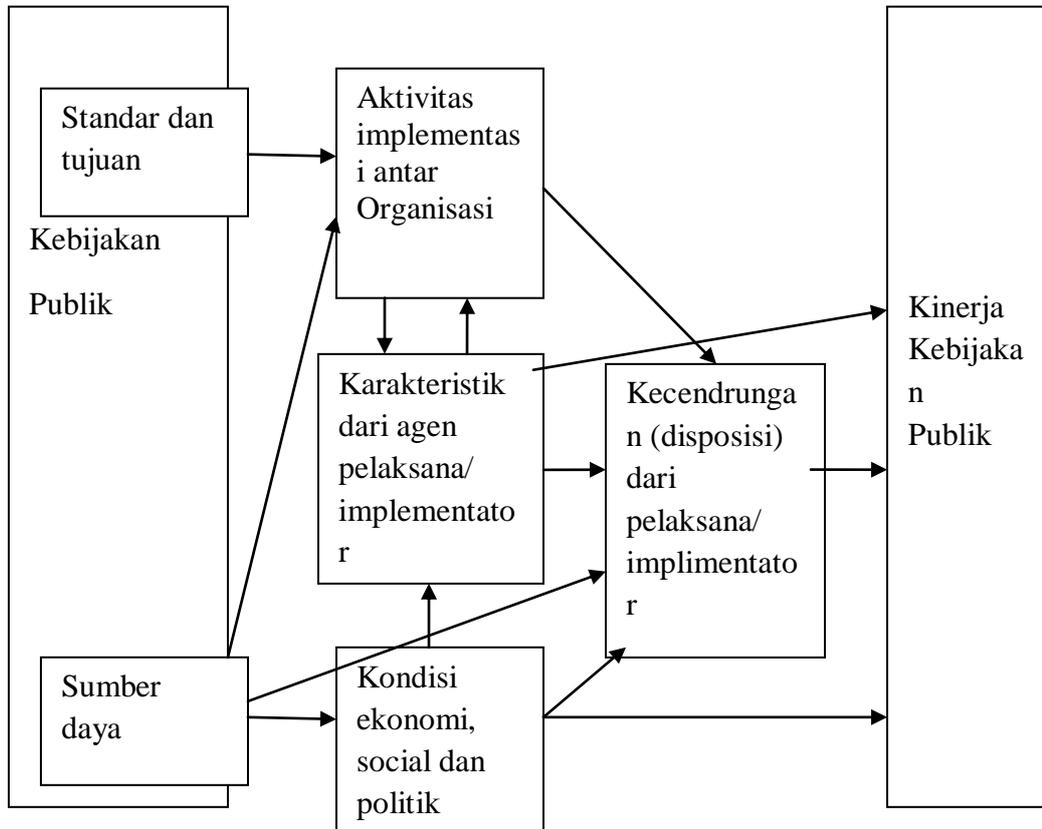
1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementator,
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik,
4. Kecendrungan (disposisi) dari pelaksana/implementator.

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan melalui gambar dibawah ini :

¹⁷ Nugroho D. Riant. *Op.Cit.* Hal. 683.

Gambar 1.3

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Carl Van Horn



Sumber : Nugroho D. Riant *Public Policy Edisi Keempat Cetakan Pertama. 2012. Hal 683.*

Berbeda dengan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn diatas, model yang disusun oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern dan David O’Poter yang lebih menekankan implementasi kebijakan publik pada pola dari bawah keatas (bottom-topper) dan lebih berada di mekanisme pasar. Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang mereka miliki.

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya.

Sedangkan Model Impelementasi Kebijakan Edward III mengemukakan ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan, tapi informasi kebijakan juga harus pula disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakn publik agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2. Sumber Daya (*resources*)

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Efektifitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian), pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang ditangani.

b) Sumber Daya Anggaran

Terbatasnya sumber daya anggaran (keuangan), akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan dapat terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya ini merupakan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan juga informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut.

Informasi juga sangat penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan

kewajibannya. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilakukan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dengan begitu implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien para pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukan kebijakan serta mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Ada tiga elemen respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri atas pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), intansitas terhadap kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

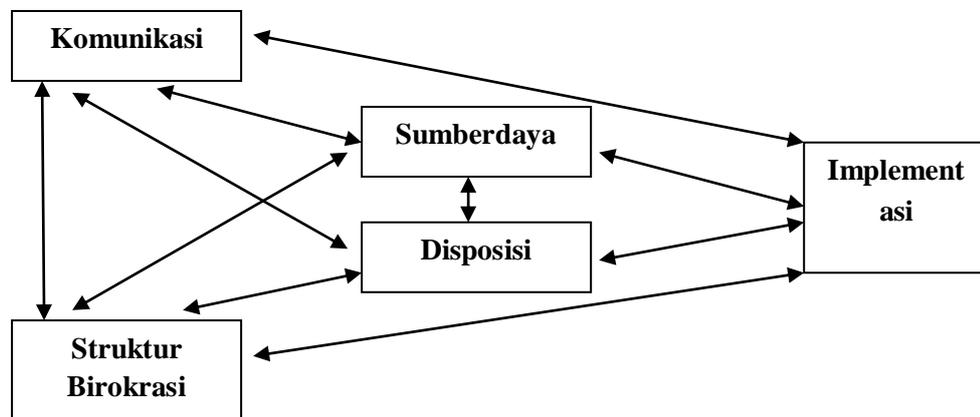
Struktur birokrasi yang efisien dapat membuat implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, karena meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementor*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi.

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Model dari George C Edward III ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.4

Model Implementasi Edward III



Sumber : Indiahono D. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. 2009. Hal 33.

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program diberbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik.¹⁸

Sedangkan menurut Donald P. Warwick, dalam tahap implementasi program terdapat dua kategori faktor yang bekerja mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek, yaitu: faktor pendorong (*facilitating condition*) dan faktor penghambat (*impeding condition*).¹⁹

¹⁸ Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Yogyakarta: Gava Media, 2009, Hal. 33.

¹⁹ Wahab, Solichin Abdul, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Malang: Penerbit FIA Unibraw dan IKIP, 1997, Hal. 67.

Warwick menjelaskan faktor pendorong dalam implementasi program (*facilitating condition*) tersebut terdiri dari:

1. Komitmen pimpinan politik (*commitment of political leaders*), yakni adanya komitmen dari pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan suatu proyek menjadi hal yang utama, karena pimpinan politik adalah yang memiliki kekuasaan di daerah.
2. Kemampuan organisasi (*organizational capacity*).
3. Komitmen para pelaksana (*the commitment of implementers*)
4. Dukungan kelompok kepentingan (*interest group support*): pelaksanaan kebijakan lebih sering mendapat dukungan dari kelompok kepentingan dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebijakan.

Sedangkan beberapa faktor yang secara teoritik dapat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan program (*impeding condition*) menurut Warwick ialah:

1. Banyaknya aktor yang terlibat: semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, maka semakin rumit komunikasi dalam pengambilan keputusan dan semakin besar kemungkinan terjadi hambatan dalam implementasi proyek tersebut.
2. Terdapat komitmen atau loyalitas ganda: hal ini disebabkan adanya tugas ganda yang dirangkai dan dijabat oleh suatu organisasi sehingga perhatian pelaksana menjadi terpecah.

3. Kerumitan yang melekat pada proyek-proyek itu sendiri (*intrinsic complexity*): hambatan yang biasanya melekat adalah disebabkan oleh faktor-faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan pangan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat.
4. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak: semakin banyak jenjang pengambilan keputusan atau memiliki prosedur yang harus disetujui oleh pihak yang berwenang, maka akan memerlukan waktu lama dalam pelaksanaannya.
5. Faktor lain, yaitu waktu dan perubahan kepemimpinan: perubahan kepemimpinan baik pada tingkat pimpinan pelaksana maupun dalam organisasi di daerah sedikit banyak mempunyai pengaruh terhadap proyek atau program.²⁰

Penelitian ini peneliti akan mengelaborasi model implementasi George c. Edward III dan model Donald P. Warwick sebagai landasan untuk mengetahui faktor-faktor yang yang berpengaruh terhadap implementasi Program Keluarga Harapan, dimana penelitian ini akan menitik beratkan pada Bagaimana Impelementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak. Model George c. Edward III dipilih sebagai landasan karena dikaitkan dengan kesesuaian pada permasalahan dan fenomena yang ada, selain itu teori dari Edward III juga dipilih karena lebih kepada ke manajemen publik.

²⁰ *Ibid*, Solichin Abdul Wahab. Hal. 67.

Teori dari Donald P. Warwick dipilih dalam penelitian ini karena untuk melihat faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang di temui dalam implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Pandak.

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan Pendidikan dan Kesehatan.

Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan millennium (*Millennium Development Goals* atau *MDGs*). Setidaknya ada 5 komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, Pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.²¹

Dengan PKH diharapkan Peserta PKH memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu: kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial,

²¹ *Ibid*

ketidak berdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.²²

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM, Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM, dan Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.²³

Komitmen yang tinggi dari pelaksana diharapkan mampu mencapai tujuan yang sudah direncanakan, tentu saja tidak hanya pada tataran pelaksana yang berperan penting dalam pelaksanaan program keluarga harapan ini, peran penting dalam implementasi program keluarga harapan adalah masyarakat itu sendiri, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik, dan mengikuti prosedur dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.²⁴

²² Direktorat Jaminan Sosial. Naskah Pedoman Umum Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2013, Hal. 2.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, Hal. 14.

Adapun ketentuan calon peserta PKH adalah Rumah Tangga sangat/ Keluarga Sangat miskin Miskin (RTSM/KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas, dan atau
2. Memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan atau
3. Memiliki anak usia SD dan SLTP serta dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Mulai tahun 2012 basis bantuan PKH diarahkan pada Keluarga Sangat Miskin (orang tua - ayah, ibu dan anak). calon peserta PKH adalah Rumah Tangga / Keluarga dengan peringkat kesejahteraan tujuh persen (7%) terendah. Penjenjangan berdasarkan status kesejahteraan menggunakan metoda indeks kesejahteraan yang obyektif dan spesifik untuk setiap Kabupaten/Kota.

Kedepan basis bantuan PKH akan diarahkan pada keluarga (yaitu orang tua – ayah, ibu dan anak). Wacana perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga adalah satu unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.²⁵

²⁵ *Ibid*, Hal. 26.

a. Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan

Di sekolah / madrasah / penyelenggara paket A/B, guru mencatat ketidakhadiran seluruh siswa penerima PKH untuk memantau tingkat kehadiran yang telah ditentukan yaitu minimal 85 persen% dari hari sekolah atau ketentuan tatap muka muka Paket A/B/SMP SMP terbuka / keaksaraan fungsional dalam 9 bulan. Pengecualian diberlakukan pada pada siswa yang absen karena sakit paling lama 3 hari atau terjadinya bencana alam di daerah tersebut.

Jika absen karena sakit lebih dari 3 hari secara berturut-turut, siswa tersebut diwajibkan memberikan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter atau petugas kesehatan yang diakui. Secara periodik, yaitu di awal bulan, pendamping Pendamping akan mengirim formulir verifikasi untuk tiga bulan sekaligus dan mengambil formulir tersebut pada setiap akhir bulan untuk diproses lebih lanjut.

Ketentuan persyaratan yang berlaku bagi anak-anak yang bersekolah di madrasah dan pendidikan luar sekolah diatur tersendiri dalam buku pedoman operasional bagi pemberi Pelayanan Pendidikan.²⁶ Di Bidang pendidikan ini diharapkan peserta PKH dapat mengikuti kegiatan dengan baik, dengan mengikuti proses belajar mengajar diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang baik di tanah air.

²⁶ *Ibid*, Hal. 65.

b. Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan

Verifikasi sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH komponen kesehatan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat paling lambat seminggu setelah ibu/wanita rumah tangga penerima mendapatkan kartu PKH. Pada kunjungan tersebut, peserta harus memeriksakan anak/kandungannya untuk dibuatkan catatan status kondisi kesehatan pada awal program dan jadwal kunjungan pemeriksaan berikutnya dengan membawa kartu peserta PKH.²⁷

Pemeriksaan awal ini merupakan dasar untuk pembayaran pertama. Verifikasi sebagai bukti kehadiran dilakukan pada pemeriksaan berikutnya yang dilakukan di pusat layanan kesehatan terdekat dengan tempat tinggal peserta, baik Puskesmas maupun jaringannya seperti Posyandu, Pustu, Polindes dan Pusling. Khusus untuk kelahiran bayi, jika peserta tidak memungkinkan mendatangi fasilitas kesehatan, kelahiran bayi bisa ditolong dengan cara mengundang tenaga kesehatan terlatih (misalnya bidan desa) untuk membantu proses kelahiran.²⁸

Verifikasi dilakukan oleh petugas kesehatan kepada semua peserta PKH untuk memantau kehadiran/ pemeriksaan pada layanan kesehatan. Seluruh mekanisme pelaksanaan verifikasi disajikan lebih rinci pada

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

buku pedoman operasional PKH bagi pemberi pelayanan pendidikan dan pedoman operasional PKH bagi pemberi pelayanan kesehatan.²⁹

Di bidang kesehatan, diharapkan kepada para peserta PKH untuk selalu memeriksakan kandungannya serta memeriksakan bayi nya ke posyandu terdekat. Upaya ini dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan yang berkepanjangan, di harapkan dengan memberikan kesehatan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan lebih baik.³⁰

E. Definisi Konseptual

Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian dan jika masalah dan kerangka teorinya sudah jelas biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala tersebut.³¹

Definisi konseptual ini maksudkan sebagai gambaran yang lebih segar untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian atau pembatalan pengertian tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan, dan definisi konseptual pada penelitian ini adalah antara lain :

²⁹ *Ibid*, Hal. 67.

³⁰ *Ibid*

³¹ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1997, Hal. 21.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian program yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindak pelaksanaan dari kebijakan yang dilakukan baik individu, pemerintah dan swasta yang berbentuk program yang telah ditetapkan dengan menggunakan berbagai macam sumber daya dalam suatu pola yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan bersama.

3. Program Keluarga Harapan

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur variabel penelitian.³²

A. Variabel Yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

1. Komunikasi

- a. Komunikasi Antara Staf/Pelaksana Program Keluarga Harapan
- b. Komunikasi Pelaksana dengan Perangkat Desa
- c. Komunikasi Pelaksana Dengan Masyarakat/Peserta PKH

2. Sumber Daya

- a. Terkait Dengan Jumlah Dan Kualitas Staf/Pelaksana
- b. Sumber Dana, Kemudahan Pengambilan Dana dan Ke Efektivitasan Penggunaan Dana.
- c. Sarana dan Prasarana Penunjang Program.

³² Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1983, Hal. 46.

3. Disposisi

- a. Sikap Pelaksana dalam Implementasi Program Keluarga Harapan.
- b. Respon Pelaksana Program Keluarga Harapan Dan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Harapan.

4. Struktur Birokrasi

- a. Struktur Organisasi Pelaksana Program Keluarga dan Kewenangan Pelaksana.
- b. SOP (*Standard Operating Procedure*) dan Fragmentasi.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Impelementasi Program Keluarga Harapan

1. Faktor Pendukung Implementasi Program Keluarga Harapan

- a. Komitmen Pelaksana Program Keluarga harapan
- b. Respon Kelompok Sasaran Terhadap Program

2. Faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan

- a. Pemahaman Kelompok Sasaran
- b. Faktor Teknis Dalam Organisasi Pelaksana

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini bermaksud ingin mencermati dan menelaah lebih jauh tentang implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Untuk mendapatkan kesimpulan objektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejalanya yang menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan situasinya.³³

Adapun karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena sosial secara jelas dan cermat, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hadari nawawi memberikan pengertian metode deskriptif sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek yang penelitian (seorang, lembaga, kelompok/masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁴

³³ Lexi J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002, Hal. 3.

³⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, Hal. 63.

Penelitian deskriptif ini meliputi :

1. Penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.
2. Penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat
3. Penelitian yang memperkirakan proporsi orang yang mempunyai pendapat, sikap atau bertingkah laku tertentu.
4. Penelitian yang berusaha untuk melakukan bermacam ramalan. Apabila sebelum melaksanakan program kita ingin mengetahui beberapa persen atau beberapa orang yang mendukung dan yang menentang dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu dalam melakukan suatu penelitian atas sampel yang diambil dari masyarakat tersebut.³⁵

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri metode penelitian deskriptif diatas maka operasionalnya berkisar pada pengumpulan data yang selanjutnya disusun, diolah, dan ditafsirkan. Selanjutnya data yang telah diolah tersebut diberi makna yang rasional dengan mematuhi prinsip-prinsip logika untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat kritis.

³⁵ DR. Irawan, Soeharto, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, Hal. 35.

2. Unit Analisa Data

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pihak yang tentunya terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu :

1. Dinas Sosial Kabupaten Bantul,
2. Pendamping Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak,
3. Peserta Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini data primernya adalah masalah yang berkaitan dengan Implementasi Program Keluarga Harapan dimana data primer ini diperoleh dari wawancara, kuisioner, ataupun melakukan pengamatan secara langsung lapangan.

Tabel 1.6
Data Primer

No	Data	Sumber Data
1.	Informasi Tentang Komunikasi	- Dinas Sosial - Pendamping PKH
2.	Informasi Tentang Sumber Daya	- Dinas Sosial
3.	Informasi Tentang Disposisi	- Dinas Sosial - Pendamping PKH - Masyarakat
4	Struktur Birokrasi	- Dinas Sosial
5	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	- Dinas Sosial - Pendamping PKH
6	Respon Terhadap Program	- Peserta

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari kajian-kajian sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam analisa masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumen, literature, artikel, foto dan lain sebagainya.

Tabel 1.7
Data Sekunder

No	Data	Sumber Data
1.	Informasi Tentang PKH	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Pedoman Umum Keluarga Harapan, • Buku Kelembagaan PKH, dan • Website TNP2K
2.	Data PKH	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Program Keluarga Harapan Tahun 2013
3.	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra Dinas Sosial Tahun 2011-2015 • Buku Pedoman Umum Keluarga Harapan,
4.	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra Dinas Sosial Tahun 2011-2015 • Buku Kelembagaan PKH • SOP Verifikasi dan Komitmen

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*in depth interview*)

Wawancara, yaitu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan. Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, tidak dalam suasana formal dan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada informan.

Informan dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial, Pendamping PKH, dan beberapa masyarakat yang menjadi peserta PKH. Untuk nama dari peserta PKH dalam penelitian ini disamarkan karena berkaitan dengan aturan yang dibuat oleh Dinas Sosial untuk tidak

memberikan nama asli peserta di dalam penelitian. Dimana wawancara dengan peserta dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan dan pendapat masyarakat tentang program keluarga harapan. Pertanyaan bisa semakin terfokus sehingga informasi yang bisa dikumpulkan dengan rinci dan mendalam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, literatur.

Dokumen dan arsip yang ada di lembaga-lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif dari Milles dan Huberman. Dalam teknik ini

ketiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan serentak dengan proses pengumpulan data, dalam bentuk siklus selama proses penelitian. Untuk lebih jelasnya ketiga komponen dalam model analisa interaktif dari Milles dan Huberman dapat dijelaskan dibawah ini yaitu :

a. Reduksi Data (pengumpulan data)

Merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh dilapangan, teknik ini digunakan agar data dapat digunakan sepraktis dan seefisien mungkin, sehingga hanya data yang diperlukan dan dinilai valid yang dijadikan sumber penelitian.

b. Data Display (penyajian data)

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh dilapangan maka dapat diambil kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.³⁶

³⁶ Sutopo H.B, *Penelitian Kualitatif*, Surakarta: University Sebelas Maret, 2002, Hal. 5.